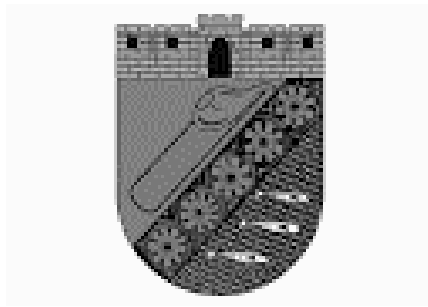




**DOKUMEN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kota Pekalongan. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

B. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026.
22. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248 tanggal 22 Januari 2021 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
23. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0004437 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2023

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100						100		
0	00	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah (jenis)	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	12	100,00
0	00	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan tepenuhinya penyediaan makan, minum rapat perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan / rumah dinas /	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dinas / Operasional Perangkat Daerah	gedung kantor / kendaraan dinas / operasional perangkat daerah.									
0	00	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin / berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	5		1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
0	00	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.	9		0	0	0,00	0,00	5,00	0	0,00
0	00	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.	300		0	0	0,00	0,00	100,00	100	100,00
0	00	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat / workshop / bintek / seminar.	1200		240	240	100,00	20,00	240,00	0	0,00
0	00	01	016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah.	5		1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
0	00	01	023	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	02		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100						100,00	100	100,00
0	00	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.	50		10	10	100,00	20,00	10,00	6	60,00
0	00	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.	50		10	10	100,00	20,00	10,00	5	50,00
0	00	02	004	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol										
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	7400		0	0	0,00	0,00	1700,00	250	14,71
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa	4600		0	0	0,00	0,00	1000,00	80	8,00

					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri	9500		0	0	0,00	0,00	2500,00	290	11,60
					Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol	35		0	0	0,00	0,00	35,00	0	0,00
1	05	15		Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	100						100,00	100	100,00
1	05	15	001	Penanganan Konflik Sosial										
					Jumlah laporan konflik sosial	15		3	3	100,00	20,00	3,00	2	66,67
					Jumlah laporan konflik yang tertangani.	726		134	128	95,52	17,63	150,00	76	50,67
					Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.	2180		280	280	100,00	12,84	400,00	160	40,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah Pemetaan/ Mapping Potensi Konflik Sosial	5		1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
					Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	90						81,00	88,16	108,84
1	05	15	002	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini										
					Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani	88		8	8	100,00	9,09	20,00	5	25,00
					Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu	64		1	1	100,00	1,56	21,00	0	0,00
					Jumlah Unjuk rasa tertangani	1550		300	289	103,81	18,65	300,00	0	0,00
					Jumlah pantauan orang asing.	30200		5.200	5.792	111,38	19,18	6000,00	0	0,00
					Jumlah laporan deteksi dini	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
					Jumlah Kader Resolusi Konflik Yang Terbentuk	6900		1.100	1.100	100,00	15,94	1100,00	200	18,18
					Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wasbang	90						81,00	91,03	112,38

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	05	15	003	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan										
					Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila	5100		600	600	100,00	11,76	900,00	0	0,00
					Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	5925		500	500	100,00	8,44	1300,00	0	0,00
					Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk	2025		150	150	100,00	7,41	450,00	0	0,00
					Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk	3055		550	550	100,00	18,00	600,00	300	50,00
					Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk	2125		250	250	100,00	11,76	450,00	240	53,33
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Apel Kebangsaan	130000		130.000	130.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00
1	05	15	004	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan										
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan	160		860	860	100,00	537,50	0,00	0	0,00
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila	300		300	300	100,00	100,00	0,00	0	0,00
					Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	35		35	35	100,00	100,00	0,00	0	0,00
1	05	16		Program Penguatan Ketahanan Bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	90						81,00	90,15	111,30
1	05	16	001	Penguatan Ketahanan Ekonomi										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018- 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
							Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi	385		105	105	100,00	27,27	70,00	35	50,00
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi	6570		770	770	100,00	11,72	1350,00	280	20,74
				Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi	130		0	0	0,00	0,00	20,00	5	25,00
				Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah	39		6	6	100,00	15,38	7,00	0	0,00
1	05	16	002	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas									
				Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah	263		49	49	100,00	18,63	49,00	4	8,16
				Jumlah Pembinaan Etnis dengan Negara	1120		160	160	100,00	14,29	240,00	240	100,00
				Jumlah Pembinaan Dalam Rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya	2160		160	160	100,00	7,41	480,00	320	66,67
				Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis	1520		160	160	100,00	10,53	240,00	0	0,00
1	05	16	003	Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.									
				Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan	1920		320	320	100,00	16,67	400,00	160	40,00
				Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi	1120		160	160	100,00	14,29	240,00	80	33,33

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Masyarakat	2200		320	320	100,00	14,55	320,00	0	0,00
1	05	16	004	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa										
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi	500		500	500	100,00	100,00	0,00	0	0,00
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Masyarakat	440		440	440	100,00	100,00	0,00	0	0,00
					Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ketahanan Bangsa	35		35	35	100,00	100,00	0,00	0	0,00
1	05	17		Program Penguatan Politik Dalam Negeri	Persentase masyarakat yang paham terhadap Aspek-Aspek IDI	90						81,00	86,53	106,83
1	05	17	001	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik										
					Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD'45	16600		1.800	1.800	100,00	10,84	3200,00	800	25,00
					Jumlah Masyarakat yang ikut Sosialisasi Penanganan dampak Pemilu/Pilkada	2560		210	210	100,00	8,20	550,00	70	12,73
					Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik	1960		300	300	100,00	15,31	500,00	0	0,00
					Jumlah Masyarakat Yang Ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	2480		400	400	100,00	16,13	600,00	0	0,00
1	05	17	002	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik										
					Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik	16700		1.300	1.300	100,00	7,78	3300,00	560	16,97
					Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut	1360		80	80	100,00	5,88	240,00	0	0,00

					Penguatan Peran Politik									
					Jumlah Fasilitas Forkopimda	2500		500	500	100,00	20,00	500,00	0	0,00
					Hasil Pendataan Parpol	175		35	35	100,00	20,00	35,00	0	0,00
					Jumlah Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol	2000		400	400	100,00	20,00	400,00	0	0,00
					Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah	1900		200	200	100,00	10,53	400,00	0	0,00
1	05	17	003	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Politik Dalam Negeri										
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi	400		400	400	100,00	100,00	0,00	0	0,00
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Politik	1290		1.290	1.290	100,00	100,00	0,00	0	0,00
					Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Politik Dalam Negeri	35		35	35	100,00	100,00	0,00	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan tahun 2021 berdasarkan LAKIP 2021 yang sudah disusun menetapkan dua sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2021 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 93,65%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	80	81	83	86	88,41	90,6	83	86	-
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	80	81	83	86	87,49	86,53	83	86	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya etnis /suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa
- b. Meningkatnya Pemahaman Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Terhadap Tata Kehidupan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan akan melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Pekalongan pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
- d. Terhitung 6 kasus konflik keagamaan pada masa pandemi terkait penolakan jenazah maupun kegiatan keagamaan.
- e. Meningkatnya gangguan kamtibmas terutama terhadap narapidana yang mendapat asimilasi akibat masa pandemi Covid 19 yang kembali melakukan tindakan pidana.

2. Bidang Ketahanan Bangsa:

- a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;

- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - e. Terdapat 12 kejadian konflik sosial dalam penyaluran Bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
 - d. Terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada Serentak 2021, karena masa pandemi Covid 19, sehingga Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2021, terdapat 208 Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021 mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah.

C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Kota Pekalongan dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Pekalongan dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Kota Pekalongan sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kota Pekalongan tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangkaantisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;

12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota Pekalongan dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program- program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kota Pekalongan.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Pekalongan :

**Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kota Pekalongan**

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	83%	5.178.001.000	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	83%	5.178.001.000	
B	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	22.464.195.000	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	22.464.195.000	
C	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	4.790.375.000	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	4.790.375.000	
D	Program peningkatan kewaspadaan nasional	Jawa Tengah	Persentase Penanganan	100%	16.422.035.000	Program peningkatan kewaspadaan nasional	Jawa Tengah	Persentase Penanganan	100%	16.422.035.000	

	dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial		Kejadian Terkait Konflik Sosial			dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		Kejadian Terkait Konflik Sosial			
			Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	83%				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	83%		
E	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika Serta budaya politik	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83%	29.272.190.000	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya Politik	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83%	29.272.190.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	Hibah sosial kemasyarakatan				
1.	Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Jawa Tengah	Peningkatan fasilitasi kebutuhan masyarakat	16.670.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat dan Hasil Reses/Aspirasi DPRD
B.	Hibah instansi vertikal				
1.	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jawa Tengah	Peningkatan koordinasi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	9.096.400.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
2.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jawa Tengah	Peningkatan koordinasi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20.713.490.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2023 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Kota Pekalongan tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2023 antara lain :
 1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS
 2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
 3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN

4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas.
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Pekalongan.
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama.
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya etnis /suku/ agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai - nilai kehidupan berbangsa.
- b. Meningkatnya Pemahaman Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Terhadap Tata Kehidupan Politik.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial		A. Persentase pengelolaan konflik sosial	Persen	100
		a. Meningkatnya etnis/suku/agama/ ormas dan LSM yang paham terhadap nilai – nilai kehidupan berbangsa	1. Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap nilai – nilai kehidupan berbangsa	Persen	100
		b. Meningkatnya pemahaman partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	2. Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan terhadap tata kehidupan politik	Persen	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kota Pekalongan hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kota Pekalongan memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kota Pekalongan

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU Pemda)		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lokasi	OPD Penanggung jawab
			Uraian	Target	Uraian	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Target Indikator	Rp		
							Tolok Ukur Indikator	Target	Tolok Ukur Indikator	Target	Tolok Ukur Indikator	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Indeks Kepuasan Masyarakat	81,42		80, 42					5.874.400.000		3.502.637.000		
														80,67			
					Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	77,50		71,50					2.304.517.000	73,00	1.886.872.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.304.517.000		1.886.872.000		
							Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah	100					2.304.517.000	100	1.886.872.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													16.000.000		10.902.000		
									Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100			16.000.000	100	10.902.000		
											Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2	2.500.000	2	2.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah dokumen evaluasi RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2	1.500.000	2	1.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

										Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	12.000.000	12	6.902.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	4		4			
										Jumlah dokumen Evaluasi SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2		2			
										Jumlah Dokumen SPIP yang disusun (1 dok rencana tindak pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP yang disusun	5		5			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
									Persentase ketersediaan Layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		1.795.706.000	100	1.672.501.000		
										Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	1.760.306.000	14	1.638.001.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	33.900.000	12	33.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	1.500.000	1	1.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100		9.500.000	100	9.500.000		
										Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	2	9.500.000	2	9.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100		113.800.00	100	93.416.000		
										Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	3.500.000	12	3.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

										Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	30.000.000	12	30.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1		1			
										Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	2.000.000	12	4.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	17.500.000	11	18.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8.300.000	12	8.300.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	2.500.000	12	2.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	31	50.000.000	31	27.116.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			310.632.000	100	60.419.000		
										Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.000.00	12	1.000.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	29.600.000	12	29.600.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	280.032.000	12	28.819.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			38.879.000	100	40.134.000		
										Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	42.879.000	12	24.134.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	8.000.000	1	8.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan

											Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	12	8.000.000	12	8.000.000		Politik
					Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100		100						100			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	100		100						100			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													1.255.489.000		321.633.000		
							Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan						1.255.489.000	100	321.633.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													1.255.489.000		321.633.000		
									Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100			1.255.489.000	100	321.633.000		
											Jumlah kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi aparatur yang dilaksanakan	3	42.850.000	3	40.800.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	2		2			
											Jumlah pelaksanaan pembinaan korp musik	14	232.372.000	14	140.300.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah Upacara tingkat kota yang dilaksanakan	14		14			
											Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantapan	756	980.627.000	756	100.533.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

											wawasankebangsaan bagimasyarakat dan generasi muda yang dilaksanakan						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
							Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100					665.000.000	100	136.283.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan dan Organisasi Kemasyarakatan													665.000.000		136.283.000		
									jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7			665.000.000	7	136.283.000		
										7	Jumlah kelembaga/ormas yang dibina	7	665.000.000	7	136.283.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA																	
							Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100					363.193.000	100	209.693.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													363.193.000		209.693.000		
									jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya	1			363.193.000	1	209.693.000		
											Jumlah Sosialisasi FORKOMKON dan Pembinaan Ormas	6	363.193.000	6	209.693.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah Sosialisasi kerukunan antar umat beragama	2		2			
											Jumlah Sosialisasi	15		15			

											Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba						
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
							persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100					55.098.000	100	91.573.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial													55.098.000		91.573.000		
								Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	1				55.098.000	1	91.573.000		
											Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun	4	55.098.000		91.573.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman kewaspadaan dini	100					
											Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial	120					
							Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	100	100					100			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
							Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang	16					1.230.743.000	16	856.583.000		

							mengikuti pendidikan politik										
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													1.230.743.000		856.583.000		
									Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100			1.230.743.000	100	856.583.000		
											Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Parpol	9	769.900.000	9	774.700.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan Pendidikan politik	30	460.843.000	30	81.883.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Kota Pekalongan antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.